



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN//5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2009 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2009 Nomor 0136)
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 01, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013 Nomor 0247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
2. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
3. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
4. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
5. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Daerah, adalah Kabupaten Morowali.
6. Bupati adalah Bupati Morowali.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten digunakan oleh Perangkat Kabupaten untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 4

Pembinaan atas pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 5

Pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Morowali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

BUPATI MOROWALI	
1. Sekretaris Daerah	
2. Kepala Dinas	
3. Kepala Badan	
4. Kepala Kantor	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 26 Maret 2020
BUPATI MOROWALI

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal
SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

MOH JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR: 011

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
II TAHUN 2020
TENTANG TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1. Menciptakan Pemerintahan yang baik dan Bersih	1.1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	- Opini BPK terhadap laporan Keuangan - Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA - Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
	1.2. Meningkatnya Kapabilitas Profesional	- Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan Kedinasan - Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural dan fungsional
	1.3. Meningkatnya Kesejahteraan Aparatur Pemerintah	- Terwujudnya Penyediaan Tunjangan Kinerja (Tukin) Aparatur secara Adil dan Proporsional
	1.4. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat dan Prima	- Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk - Persentase kepemilikan akte kelahiran - Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku - Web Side milik Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam	2.1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	- Persentase PAD terhadap APBD
3. Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan Iklim Investasi	3.1. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	- Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
	3.2. Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif	- Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

		berskala nasional (PMDN/PMA) (juta) - Rasio daya serap tenaga kerja (TK/PMA dn PMDN) - Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (juta)
4. Meningkatkan Peran Koperasi dan UMKM	4.1. Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Pengelolaan SDA	- Persentase UKM non BPR/LKM aktif (Jumlah UKM non BPR/LKM UKM) - Persentase BPR/LKM aktif (Jumlah BPR/LKM) - Persentase Usaha Mikro dan kecil (Jumlah usaha mikro dan kecil) - Persentase koperasi aktif - Jumlah koperasi aktif - Jumlah seluruh koperasi
5. Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	5.1. Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat	- Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (HK 2000) - Pertumbuhan Industri (HK 2000)
6. Terwujudnya Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Kerjasama Perdagangan	6.1. Terwujudnya Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Kerjasama Perdagangan dan Peningkatan Ekspor	- Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
7. Terwujudnya Pengembangan Wilayah Transmigrasi	7.1. Terwujudnya Pengembangan Wilayah Transmigrasi	- Terlaksananya Transmigrasi Lokal - Terlaksananya Transmigrasi Regional
8. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas guna Menciptakan SDM yang Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bertaqwa	8.1. Terlaksananya Pembiayaan Pendidikan Gratis	- Persentase APK PAUD - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B - Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C - Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A - Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/Mts/Paket B - Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI - Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts - Angka Kelulusan (AL)

		- Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts - Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) - Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar - Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan SLP - Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan SLA - Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar - Rasio guru terhadap murid pendidikan SLP - Rasio guru terhadap murid pendidikan SLA
	8.2. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pengajar 8.3. Meningkatnya Kualitas Peserta Didik pada Semua Jenjang Pendidikan	- Mengembangkan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
9. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Merata Berkualitas	9.1. Meningkatnya Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan Gratis	- Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup - Angka kelangsungan hidup bayi - Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup - Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup - Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) - Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (jumlah gizi buruk) - Cakupan balita pneumonia yang ditangani - Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DB - Penderita diare yang ditangani - Angka kejadian Malaria

		kunjungan K4) - Cakupan pelayanan anak balita
10. Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	10.1. Terwujudnya Pembinaan Keluarga Sehat dan Sejahtera	- Laju pertumbuhan penduduk (LPP) - Persentase Perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB - Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun - Rasio akseptor KB - Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB - Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB - Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB - Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan
11. Terwujudnya Keindahan Lingkungan Agar tercipta Suasana Sehat dan Nyaman	11.1. Terciptanya Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan	- Terwujudnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Terwujudnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (TRH)
12. Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.1. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	- Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR - Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur - Rasio KDRT - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu - Partisipasi angkatan kerja perempuan - Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah - Partisipasi perempuan di lembaga swasta
13. Terwujudnya Pemberdayaan	13.1. Meningkatkan Keberdayaan	- Meningkatkan Keberdayaan

	dalam Perekonomian dan Pembangunan	- Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa - Persentase kantor desa dalam kondisi baik - Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK - PKK aktif - Posyandu aktif
14. Meningkatkan Produksi Pangan dan Ketahanan Pangan	14.1. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Pertanian/ Perkebunan dan Peternakan 14.2. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan serta Pengawasan Sumberdaya Kelautan	- Kontribusi sector pertanian/perkebunan terhadap PDRB - Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar - Terberdayanya Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan - Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan - Meningkatnya Penerapan Teknologi Peternakan - Terwujudnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak - Produksi perikanan laut - Produksi perikanan darat - Terwujudnya Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan - Terwujudnya Pengembangan Perikanan Tangkap - Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial
15. Terwujudnya Perlindungan Sumber Daya Hutan	15.1. Terwujudnya Perlindungan dan Konservasi Hutan	- Terwujudnya Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan - Terwujudnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan - Terwujudnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan
16. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi	16.1. Terwujudnya Penerapan TTG	- Meningkatkan Kemampuan Teknologi Industri - Meningkatkan

		Sistem Produksi - Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (HK 2000)
17. Terwujudnya Terciptanya Stabilitas Harga dan Kepastian Pasar	17.1. Terwujudnya Stabilitas Harga dan Kepastian Pasar	- Meningkatkan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
18. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Harmonis dan Bahagia	18.1. Meningkatnya Fasilitas Air Bersih 18.2. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Daerah	- Terwujudnya Penyediaan dan Pengolahan Air Baku - Terwujudnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - Rumah tangga pengguna air bersih (%) - Persentase penduduk berakses air minum - Terwujudnya Pembangunan Jalan dan Jembatan - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) - Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk - Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) - Rasio Jaringan Irigasi - Terwujudnya Sertifikasi dan Keahlian Teknik Tenaga Kerja Lokal - Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Sarana Fasilitas Perhubungan - Jumlah kapal berangkat - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis - Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan - Jumlah arus penumpang angkutan umum (kapal laut) - Jumlah penumpang turun - Jumlah penumpang

		- Persentase layanan angkutan darat - Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun - Pemasangan rambu-rambu - Jumlah Uji KIR Angkutan Umum - Persentase Kepemilikan KIR Kendaraan Bermotor
19. Terwujudnya Penataan Ruang yang Terpadu dan Berkelanjutan	19.1. Tersedianya Perumahan bagi Masyarakat yang Berpendapatan Rendah (MBR) 19.2. Terwujudnya Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Penataan Areal Pemakaman Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan Lingkungan 19.3. Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan Lingkungan 19.4. Terwujudnya Penanggulangan dan Mitigasi Bencana secara Terpadu	- Terwujudnya Pengembangan Perumahan (Unit) - Rumah Layak Huni (%) - Rumah tangga pengguna air bersih (%) - Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran - Meningkatnya pengelolaan areal pemakaman - Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) - Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) - Persentase Penegakan PERDA - Terwujudnya Pelaksanaan Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing - Mewujudkan Optimalisasi Fungsi Komunitas Intelejen Daerah - Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat - Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap - Terwujudnya

		Bencana
20. Terwujudnya Penataan Ruang yang Terpadu dan Berkelanjutan	20.1. Terwujudnya Pengembangan dan Penataan Ruang dan Kewilayahan	- Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB - Persentase luas lahan bersertifikat - Terwujudnya Penyelesaian KonflikKonflik Pertanahan
21. Mengembangkan Potensi Pemuda dan Olahraga	21.1. Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Olahraga 21.2. Meningkatnya Pengembangan Potensi dan Peran Serta Pemuda	- Jumlah organisasi olah raga - Jumlah organisasi olah raga - Lapangan olah raga - Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda) - Jumlah prestasi olahraga : a. Emas b. Perak c. Perunggu
22. Mengembangkan Obyek Wisata	22.1. Terlaksananya Inventarisasi Destinasi Wisata	- Kunjungan Pariwisata
23. Mengembangkan Seni dan Budaya	23.1. Meningkatnya Pengembangan Seni dan Budaya	- Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan - Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya - Penyelenggara festival seni dan budaya - Terwujudnya Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
24. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa	24.1. Meningkatnya Pembinaan Masyarakat 24.2. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Sosial	- Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial - Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial - Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar - Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis

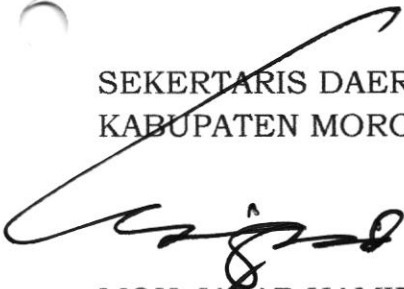
		- Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya - Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial
--	--	---

BUPATI MOROWALI,



TASLIM.

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



MOH JAFAR HAMID.

KABUPATEN MOROWALI	
1. Nama	
2. Alamat	
3. No. Telp	
4. No. Fax	
5. No. Email	